

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Penduduk dikatakan sebagai asset pembangunan jika penduduk memiliki keterampilan dan keahlian yang dapat berkontribusi pada produktivitas nasional dan dapat mengaklarsi pertumbuhan ekonomi (Devita *et al.*, 2014). Selain itu, keterlibatan aktif penduduk dalam proses pembangunan, baik melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program-program Pembangunan juga sangat vital dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (A'an *et al.*, 2021)

Populasi penduduk Indonesia sekitar 270 juta orang dan 60 persen diantaranya merupakan penduduk usia muda. Diperkirakan, negara ini akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030, yang terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Namun, potensi keuntungan dari bonus demografi ini bisa hilang atau bahkan menjadi beban jika penduduk usia produktif tidak dapat menemukan lapangan kerja yang memadai (Setiawan, 2019).

Masalah pengangguran pada usia muda (15-24) menjadi perhatian serius di Indonesia karena tingkat pengangguran di kelompok ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran usia muda di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 43,05 persen (BPS, 2023).

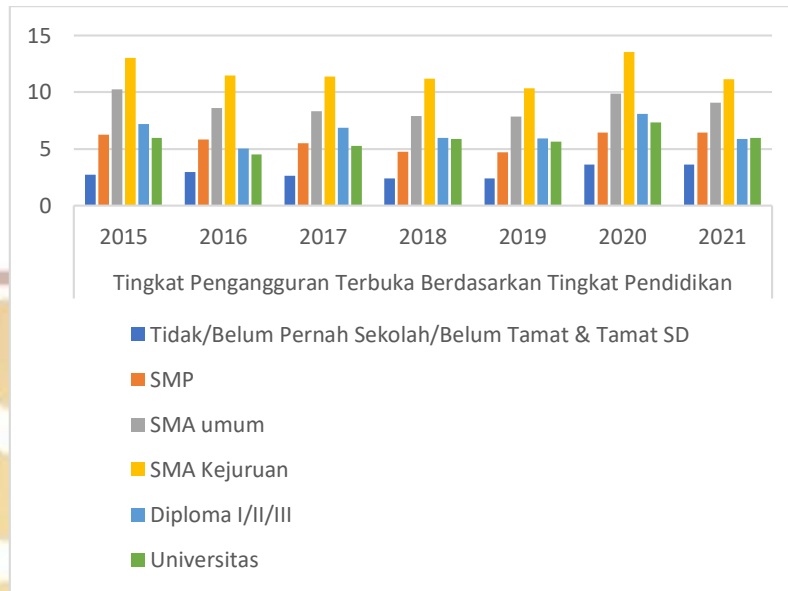
Studi dari World Bank (2019) menyebutkan bahwa lebih dari 20 persen pemuda tidak sedang menempuh pendidikan, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan.

Selain itu, kelompok dengan tingkat pendidikan tinggi mendominasi jumlah pengangguran di Indonesia dibandingkan dengan kelompok berpendidikan lainnya (BPS, 2023). Tingginya tingkat pengangguran dan banyaknya lowongan pekerjaan yang tidak terisi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan pekerjaan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja (ILO, 2014).

Kenaikan persentase penduduk usia kerja akibat bonus demografi merupakan sumber potensial dari tenaga kerja yang tersedia. Apabila mereka dapat terserap ke dalam sektor pekerjaan yang produktif, ini akan mengakibatkan peningkatan pendapatan, tabungan, dan investasi secara keseluruhan. Proses ini selanjutnya akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan. Meskipun demikian, penting untuk menyeimbangkan dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Jika pasar tenaga kerja tidak mampu menyerapnya dengan efisien, akan sulit menghindari peningkatan tingkat pengangguran (Adioetomo, 2015).

Pengangguran muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dan angkatan kerja yang tersedia di pasar kerja, yang menunjukkan adanya sumber daya yang tidak dimanfaatkan (Romer, 2012). Pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, termasuk mereka yang belum bekerja namun berusaha mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia, pengangguran merupakan masalah yang semakin rumit, dengan angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun (Wijayanti & Humardhiana, 2020).

Gambar 1. 1 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia 2015-2021 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa lulusan SMA dan SMK mendominasi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran lulusan SMA mencapai 7,87 persen, sedangkan lulusan SMK mencapai 10,36 persen. Pada tahun 2020, angka ini meningkat, dengan pengangguran lulusan SMA menjadi 9,86 persen dan lulusan SMK mencapai 13,55 persen. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran lulusan SMA tetap di 9,86 persen, sementara lulusan SMK turun menjadi 11,13 persen. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SD ke bawah, SMP, dan universitas lebih rendah dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah. Meningkatnya pengangguran di kalangan lulusan SMA dan SMK mengindikasikan bahwa mereka kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan harapan.

Salah satu cara pemerintah Indonesia untuk mengatasi pengangguran adalah dengan memberikan pelatihan yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja di Indonesia. Hal ini memungkinkan

mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri. Adanya keahlian dan pengetahuan yang kuat juga berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran (Putri, 2021; Zaki & Pertiwi, 2023).

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kartu Prakerja pada April 2020 untuk mengatasi rendahnya daya saing dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76/2020, program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan kerja, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja. Selain itu, dengan meningkatkan keterampilan, program ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia (Rafitrandi, 2020).

Program Kartu Prakerja menghadirkan berbagai inovasi dalam kebijakan publik di sektor ketenagakerjaan. Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui pelatihan. Program Kartu Prakerja ini terdiri atas dua skema implementasi, yakni pelatihan kerja dan insentif. Sebagai penyedia pelatihan, program ini merupakan salah satu bentuk Active Labour Market Policies (ALMP). Kebijakan Aktif Ketenagakerjaan (ALMP) bertujuan untuk secara aktif meningkatkan peluang pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di pasar tenaga kerja (ILO, 2016). Kebijakan ini diturunkan ke dalam empat jenis program, yaitu: asistensi pencarian kerja, pelatihan kerja dalam rangka penyesuaian kebutuhan pasar tenaga kerja, insentif untuk pekerjaan di sektor swasta, dan subsidi di sektor pemerintah (Kluve *et al.*, 2007).

Di sisi lain, insentif yang juga diberikan kepada penerima Program Kartu Prakerja menjadikan program ini menyerupai program *unemployment benefit* dalam varian yang berbeda. Kebijakan ini merupakan bentuk proteksi kepada pekerja

terhadap risiko kehilangan pekerjaan sehingga meminimalisir peluang menjadi miskin saat menganggur sekaligus sebagai insentif bagi seseorang dalam mencari pekerjaan yang sesuai dan meningkatkan kompetensinya (Asenjo & Pignatti, 2019).

Berdasarkan annual report prakerja Indonesia memaparkan bahwa terdapat 5,98 juta penerima program kartu prakerja pada batch 11 tahun 2021. Sebanyak 88,92 persen penerima manfaat yang menyelesaikan pelatihan pada program Kartu Prakerja (prakerja, 2024)

Hasil penelitian mengenai efektivitas implementasi Kebijakan Aktif Ketenagakerjaan (ALMP) di kawasan Amerika Latin dan Karibia menunjukkan bahwa program modal manusia seperti pelatihan yang meningkatkan kompetensi pekerja ini memiliki dampak kecil dalam jangka pendek. Pada beberapa kasus cenderung tidak berdampak signifikan atau bahkan negatif (ILO, 2016). Sebaliknya, dampak yang lebih besar dari program ini terlihat dalam jangka menengah dan jangka panjang (Card *et al.*, 2010; ILO, 2016) atau jangka yang sangat panjang (Lechner *et al.*, 2011). Sistem Kompensasi Pengangguran secara matematis juga memiliki dampak penting terhadap durasi pengangguran seseorang (Borjas, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh *Alatas et al.*,(2021) menunjukkan bahwa peserta program kartu prakerja memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha jika dibandingkan dengan individu yang tidak mengikuti program tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Consuello (2020) menunjukkan bahwa peserta program kartu prakerja cenderung kurang selektif dalam memilih jenis pelatihan karena kurangnya pemahaman mengenai rencana karir mereka. Akibatnya, mereka memerlukan arahan untuk menentukan arah karir

dan memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara personal. Studi pada periode yang sama juga menemukan bahwa beberapa peserta program tidak tepat untuk mengikuti pelatihan, namun mereka memerlukan dukungan sosial yang kuat karena dampak signifikan dari pandemi Covid-19.

Durasi pencarian pekerjaan juga dipengaruhi oleh sejarah pelatihan yang diikuti oleh angkatan kerja. Seseorang yang belum mengikuti pelatihan kerja cenderung memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengalami pengangguran. Pelatihan kerja dapat berperan penting dalam membantu individu menemukan pekerjaan. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa pelatihan kerja dapat mengurangi periode pengangguran seseorang (Khan dan Yousef, 2013). Selain pelatihan kerja, pengalaman kerja juga memainkan peran kunci dalam memengaruhi kemungkinan seseorang mendapatkan pekerjaan. Memiliki pengalaman kerja dapat mempermudah individu untuk memasuki dunia kerja, sehingga durasi pencarian pekerjaan mereka biasanya lebih singkat dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pengalaman kerja (McConnel, 1999; George, 2004).

Beberapa penelitian empiris yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori pencarian kerja / *search theory* yang mengaitkan manfaat yang diterima saat menganggur, karakteristik individu yang mencari pekerjaan, karakteristik rumah tangga pencari kerja, dan lamanya proses mencari pekerjaan. Pendidikan formal juga berpengaruh terhadap lama mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin panjang waktu yang dibutuhkan dalam mencari pekerjaan (Pasay dan Indrayanti, 2012; Wulandari & Marta, 2022). Namun juga terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi

tingkat pendidikan maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan dalam mencari pekerjaan (Grogan, et.al, 2001; Khan dan Yousef, 2013).

Faktor-faktor demografi lainnya juga berpengaruh terhadap lama mencari pekerjaan. Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menyebabkan pengangguran dan memengaruhi durasi pengangguran seseorang. Penelitian sebelumnya menemukan hasil bahwa jenis kelamin merupakan faktor penyebab dari keadaan pengangguran (Jolianis, 2021)

Status perkawinan menjadi faktor yang mempengaruhi lama mencari pekerjaan. Temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa status perkawinan menjadi faktor yang mempengaruhi apakah seseorang akan mengalami pengangguran, di mana individu yang sudah menikah cenderung memiliki kecenderungan untuk tidak mengalami pengangguran jika dibandingkan dengan yang belum menikah (Foley, 1997). Peranan di dalam rumah tangga juga diyakini sebagai faktor yang memengaruhi lamanya masa pengangguran seseorang. Seorang kepala keluarga bertanggung jawab untuk bekerja demi menyokong kebutuhan keluarganya. Sementara bagi yang belum menikah, mereka mungkin masih mendapatkan dukungan dari keluarga. Khan dan Yousef (2013) menyatakan kepala rumah tangga dalam angkatan kerja lebih berpeluang lebih kecil untuk menjadi pengangguran.

Foley (1997) menyatakan individu yang tinggal di wilayah pedesaan cenderung mengalami periode pengangguran yang lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Program Prakerja baru diimplementasikan sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini maka dari itu penting untuk meneliti keterkaitannya dengan durasi pengangguran individu. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan

atau evaluasi terhadap kebijakan tersebut dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program kartu prakerja berhasil meningkatkan keterampilan baru dan terkini, juga meningkatkan efisiensi kerja dan mendorong pengembangan kebiasaan belajar baru serta peningkatan soft skills bagi penerima manfaatnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menitikberatkan pada pengaruh program kartu prakerja terhadap waktu yang dibutuhkan individu dalam mencari pekerjaan. Namun, ada area dalam penelitian yang belum tercakup, yaitu evaluasi dampak program kartu prakerja pada durasi pencarian pekerjaan bagi individu penerima manfaat, serta identifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi pada lamanya proses mencari pekerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

Peran penting penduduk dalam pembangunan ekonomi semakin diperhatikan, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Penduduk bisa menjadi aset pembangunan jika disertai dengan kualitas dan produktivitas kerja yang tinggi. Tenaga kerja berperan sebagai penghubung antara aspek demografi dan ekonomi, sehingga masalah yang muncul akan berdampak langsung pada kedua bidang tersebut. Masalah utama dalam bidang tenaga kerja adalah pengangguran, di mana angkatan kerja tidak sepenuhnya terserap karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja.

Laporan ini menyajikan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS pada Agustus 2021, yang mencakup 300 ribu rumah tangga di Indonesia secara proporsional hingga tingkat kabupaten/kota. Temuan survei menunjukkan bahwa 87,22% peserta Program Kartu Prakerja yang menyelesaikan pelatihan merasa keterampilan kerja mereka meningkat. Selain itu, 83,33% peserta menggunakan

insentif pasca pelatihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan 34,15% memanfaatkan insentif tersebut sebagai modal usaha (Sakernas, 2021).

Melonjaknya pengangguran pada masa pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi direspon oleh pemerintah, salah satunya dengan Program Kartu Prakerja. Namun, seberapa efektif kebijakan tersebut belum dapat dipastikan. Di negara lain terutama di negara maju, studi terkait Kebijakan Aktif Ketenagakerjaan (ALMP) dan kompensasi pengangguran beserta dampaknya terhadap lama menganggur memang sudah tidak asing. Namun, di Indonesia masih merupakan hal baru sehingga penelitian terkait masih sangat terbatas, kecuali mengenai determinan lama mencari pekerjaan menurut karakteristik sosial demografi dan regional.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah apakah Program Kartu Prakerja memiliki pengaruh terhadap durasi pencarian pekerjaan di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi durasi pencarian pekerjaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis :

1. Pengaruh Program Kartu Prakerja terhadap lama mencari pekerjaan di Indonesia.
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi lama mencari pekerjaan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan terutama dalam rangka

mengevaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja yang telah diimplementasikan pada tahun 2023.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang membahas durasi yang diperlukan individu penerima Program Kartu Prakerja untuk beralih dari status pengangguran ke pekerjaan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang telah bekerja dalam periode satu tahun terakhir (0-12 bulan), sehingga memungkinkan observasi yang menyeluruh. Data yang digunakan berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023.

